



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

QUARTERLY FISCAL REPORT PROVINSI JAMBI

TRIWULAN II 2019



**KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
AGUSTUS 2019**

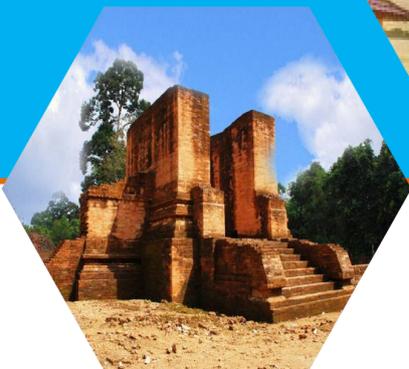
DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	- 1 -
A.	Produk Domestik Regional Bruto	- 1 -
B.	Inflasi	- 2 -
C.	Indikator Kesejahteraan	- 3 -
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	- 4 -
A.	Pendapatan Negara	- 5 -
B.	Belanja Negara	- 8 -
C.	Prognosis Realisasi APBN	- 10 -
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	- 11 -
A.	Pendapatan Daerah	- 13 -
B.	Belanja Daerah	- 15 -
C.	Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019	- 16 -
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	- 17 -
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	- 24 -
A.	Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2019	- 24 -



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan II
2019



Tim Penyusun:
Pengarah
Tiarta Sebayang

Ketua
Darmawan

Editor
Saripudin
Hendra Gunawan
Ahmad Yani

Desain Grafis
Gita Ashabira

Penyusun
Saripudin
Gita Ashabira
Bidang PPA II

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan II 2019 tumbuh sebesar 4,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh 4,70% (yoy). Namun pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,05% (yoy). Output ekonomi Provinsi Jambi triwulan II ini menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp54,324 triliun atau 1,37% dari total output Nasional (Rp3.963,5 triliun).

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi



Sumber: www.bps.go.id; jambi.bps.go.id; (diakses 5 Agustus 2019) (data diolah)

Menurut lapangan usaha, triwulan ini pertumbuhan ekonomi Jambi terjadi di hampir semua sektor lapangan usaha. Tiga sektor tertinggi pertumbuhannya (yoy) yaitu konstruksi (9,96%), perdagangan besar dan eceran (9,28%), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (7,91%). Pada triwulan ini, sektor yang menjadi penyumbang andil terbesar pertumbuhan Jambi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,41%. Sedangkan menurut pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh pengeluaran konsumsi LNPRT (12,85%), diikuti pengeluaran konsumsi pemerintah (11,59%), sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 4,26%. Sumber pertumbuhan terbesar berdasarkan sektor pengeluaran berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (1,88%).

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, terdapat beberapa fenomena yang mempengaruhi *output* ekonomi Jambi, yaitu: (1) harga berbagai komoditas di pasar global baik energi dan non energi mengalami sedikit penurunan sebagai dampak perang dagang AS - China, (2) kegiatan pemilihan umum calon anggota legislatif dan calon presiden/wakil presiden serentak yang digelar 17 April 2019, (3) adanya momen bulan ramadhan, hari raya idul fitri, paskah dan waisak, (4) sisa panen padi akibat pergeseran musim tanam di akhir tahun 2018, (5) Peningkatan realisasi APBN pada triwulan II-2019 dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (adanya gaji dan tunjangan ke-13 dan ke -14 bagi PNS/TNI/POLRI), dan (6) adanya pembatasan ekspor karet bersama Malaysia dan Thailand.

Output ekonomi Jambi triwulan II 2019 masih tumbuh 4,82% (yoy). Proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi untuk ekonomi Jambi pada Triwulan III-2019 diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,66%-5,06%.

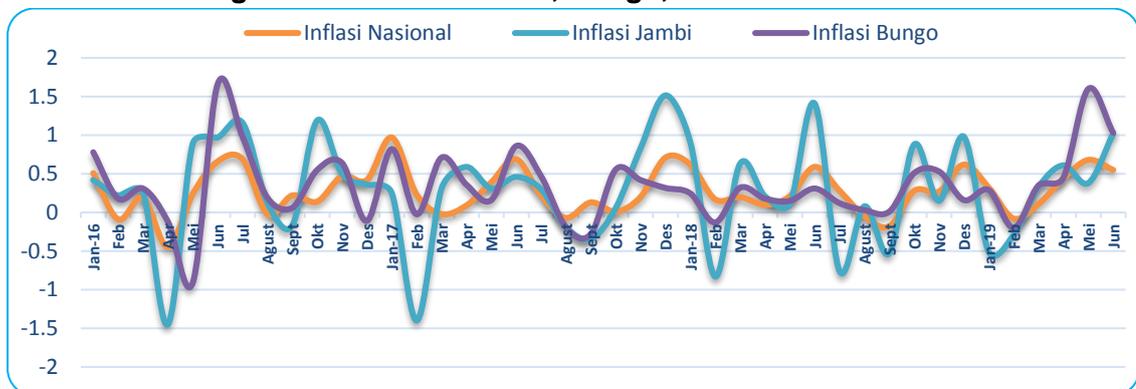
Dilihat dari strukturnya, (sisi lapangan usaha) ekonomi Provinsi Jambi belum mengalami perubahan, masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,41% dan diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 19,09%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa menyumbang 70,70%, konsumsi rumah tangga sebesar 44,00%, dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 20,70%. Berdasarkan strukturnya, ekonomi Jambi masih basisnya didominasi pada sektor primer dengan kemampuan penciptaan nilai tambah yang rendah.

Berikutnya berdasarkan proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, ekonomi Jambi hingga triwulan III-2019 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,66%-5,06% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terutama akan bersumber dari kinerja sektor pertanian didorong oleh menguatnya permintaan komoditas perkebunan dan sektor pertambangan dan penggalian. Kebijakan pemerintah terkait kewajiban penerapan B-20 untuk konsumsi bahan bakar biodiesel domestik dan konsumsi biofuel global diharapkan mampu meningkatkan harga CPO dalam negeri dan menopang konsumsi masyarakat. Sementara, pembatasan kuota ekspor karet oleh negara produsen akan mendukung perbaikan harga karet internasional dan di tingkat lokal.

B. Inflasi

Data BPS Triwulan II-2019 (terdapat 2 kota yang dihitung tingkat inflasi), berdasarkan perhitungan bulanan (*mtm*) bulan April, Mei, dan Juni untuk Kota Jambi mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,61%, 0,38%, dan 1,02%. Sedangkan inflasi Bungo masing-masing sebesar 0,45%, 1,60%, dan 1,03%. Provinsi Jambi berdasarkan perhitungan triwulanan (*qtr*) mengalami inflasi sebesar 1,02%.

Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Kota Jambi, Bungo, dan Nasional Tahun 2016-2019



Sumber: Rilis BPS Jambi 2019 (data diolah)

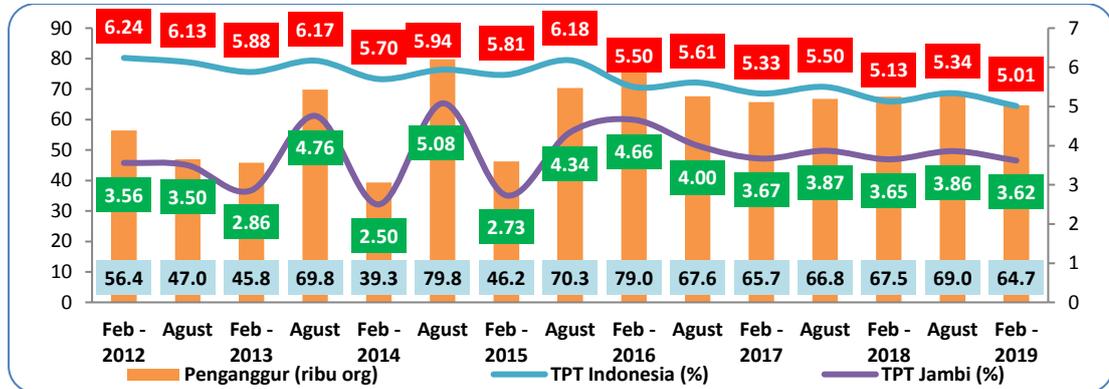
Berdasarkan asesmen Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, tekanan inflasi pada Triwulan II-2019 utamanya dipicu oleh kenaikan harga komoditas kelompok bahan makanan yang berasal dari komponen *volatile foods* berasal dari komoditas daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah disebabkan berkurangnya pasokan serta tingginya permintaan pada Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, pemilihan umum dan ekspektasi peningkatan pendapatan (THR) juga meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberi tekanan terhadap inflasi. Proyeksi Bank Indonesia, inflasi Triwulan III-2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,02-3,42% (yoy) atau masih dalam sasaran inflasi nasional sebesar 3,5+/-1% (yoy).

“Menurut data BPS (yoy), dari 23 kota se-Sumatera yang dihitung tingkat inflasinya, Kota Jambi (1,02%) dan Bungo (1,03%) menempati urutan ke-9 dan ke-8. Inflasi tertinggi di Kota Sibolga (2,25%) dan terendah di Kota Batam (0,24%)”.

Tekanan inflasi terutama akan bersumber dari kelompok pangan seiring berakhirnya musim panen dan kelompok biaya pendidikan seiring masuknya tahun ajaran baru. Selain itu, tarif angkutan udara juga diperkirakan meningkat menyusul tingginya permintaan pada periode hari besar keagamaan nasional dan libur panjang yang jatuh di triwulan III.

C. Indikator Kesejahteraan

Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jambi dan Nasional Tahun 2012-2019

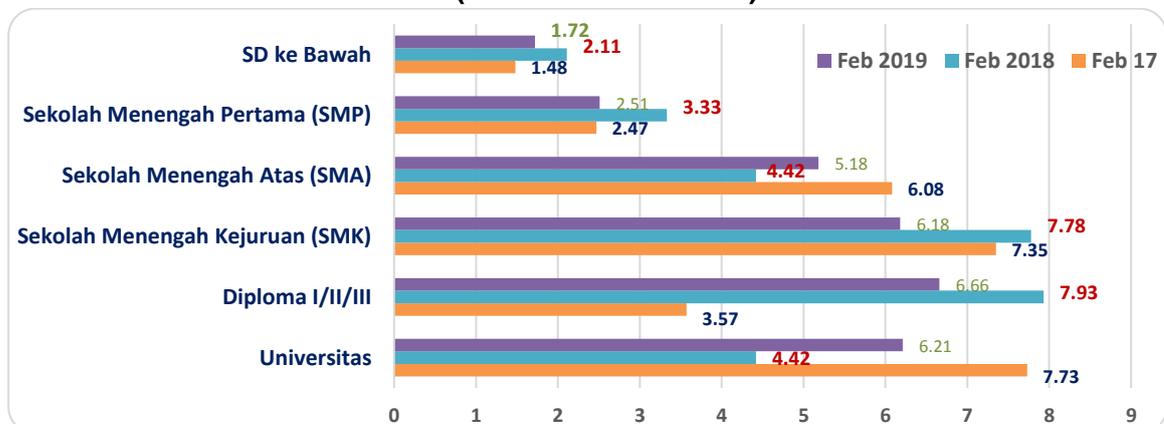


Sumber: Rilis BPS Jambi 2019 (data diolah)

“Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi pada Februari 2019 tercatat sebanyak 64,68 ribu orang. Jumlah ini lebih rendah sebesar 2,79 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 67,47 ribu orang”

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 sebesar 3,62%, turun dibandingkan pada Februari 2018 (3,65%), dan masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 5,01%. Meskipun jumlah TPT Jambi turun namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terdapat pada golongan dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III dan jenjang Universitas, dapat diindikasikan bahwa ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Diploma I/II/II dan Universitas. (2) tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi (37,27%) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah sebanyak 641,29 ribu orang.

Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (Februari 2017 - 2019)



Sumber: Rilis BPS Jambi 2019

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Informasi berikut merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruh Kementerian/Lembaga/Satker lingkup Provinsi Jambi, termasuk data Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019;

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019 dan 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Change
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	5,973.1	2,065.2	5,907.9	1,968.0	-4.7%
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	5,973.1	2,065.2	5,907.9	1,968.0	-4.7%
1. Penerimaan Pajak	5,445.2	1,732.3	5,589.2	1,676.9	-3.2%
2. PNBPN	527.9	332.9	318.6	291.1	-12.5%
II. HIBAH	-	-	-	-	
B. BELANJA NEGARA	20,044.9	8,774.2	22,269.7	10,415.4	18.7%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6,398.9	2,182.2	7,082.9	2,861.9	31.1%
1. Belanja Pegawai	2,278.1	1,045.8	2,278.8	1,141.5	9.2%
2. Belanja Barang	2,534.0	817.0	2,939.4	1,200.5	46.9%
3. Belanja Modal	1,567.8	315.0	1,845.7	516.6	64.0%
4. Belanja Bantuan Sosial	18.9	4.3	19.0	3.3	-24.3%
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	13,646.0	6,592.0	15,186.8	7,553.5	14.6%
1. Transfer ke Daerah	12,598.7	6,360.3	14,002.2	6,850.1	7.7%
a. Dana Perimbangan	12,378.2	6,298.6	13,778.4	6,738.2	7.0%
1) Dana Alokasi Umum	7,969.3	4,648.7	8,272.6	4,820.7	3.7%
2) Dana Bagi Hasil	1,434.2	545.0	2,226.1	933.4	71.3%
3) Dana Alokasi Khusus	2,974.7	1,104.9	3,279.6	984.2	-10.9%
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-	
d. Dana Transfer Lainnya	220.5	61.8	223.9	111.9	81.3%
2. Dana Desa	1,047.3	231.7	1,184.6	703.4	203.6%
C. SURPLUS/DEFISIT	(14,071.8)	(6,709.0)	(16,361.8)	(8,447.4)	-25.9%

Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, KPP se-Prov. Jambi (2019 – data diolah)

Realisasi APBN lingkup Provinsi Jambi s.d. triwulan II-2019 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp1,96 triliun. Turun sebesar 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp2,06 triliun). Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh menurunnya kinerja penerimaan perpajakan (Rp1,67 triliun) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp291,1 miliar. Secara kumulatif penerimaan perpajakan juga mengalami penurunan sebesar 3,2% dibanding tahun 2018 (Rp1,73 triliun).

Realisasi belanja negara sebesar Rp10,41 triliun, tumbuh sebesar 18,7% dibanding triwulan II-2018 (Rp8,77 triliun). Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2,86 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp7,55 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga triwulan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp2,18 triliun). Faktor utama penyebab kenaikan yaitu adanya pencairan DAK Fisik tahap I dan Dana Desa sampai dengan tahap II, serta pencairan gaji/tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas aparatur sipil negara (ASN).

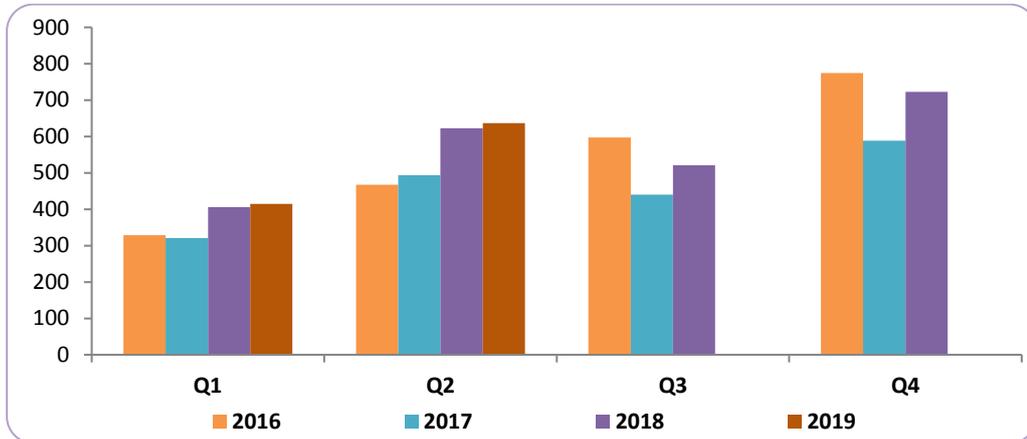
A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional. Berikut adalah data pendapatan perpajakan yang dihasilkan di Provinsi Jambi;

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPh 2016 - Triwulan II 2019 di Provinsi Jambi
(dalam Miliar Rp)



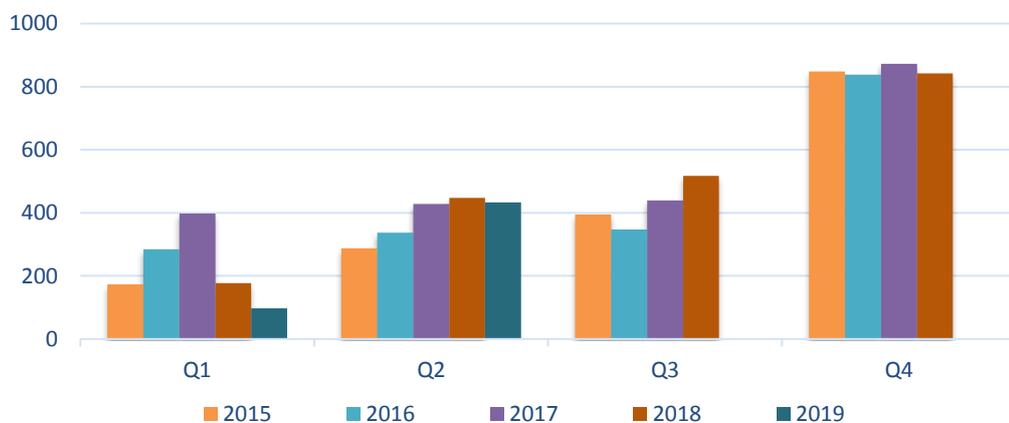
Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 25 Juli 2019) (data diolah);

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) triwulan II sebesar Rp636,96 miliar. Jumlah tersebut naik 2,3% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018 (Rp622,6 miliar). Peningkatan disumbang oleh realisasi PPh Ps 21 sebesar Rp217,8 miliar (triwulan II-2018 Rp185,71 miliar) atau naik Rp32,09 miliar. Selanjutnya, PPh Final dan PPh Pasal 26 masih mampu tumbuh masing-masing sebesar Rp107,86 miliar (9,32%) dan Rp5,31 miliar (541,9%) dibanding triwulan tahun sebelumnya (Rp98,67 miliar dan Rp0,82 miliar). Sedangkan PPh Ps 25/29 Badan merupakan penyumbang terbesar PPh sebesar Rp223,9 miliar namun mengalami penurunan sebesar 11,7% dibanding triwulan II-2018 sebesar Rp253,6 miliar.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN 2015-2019 di Provinsi Jambi

(dalam Miliar Rp)



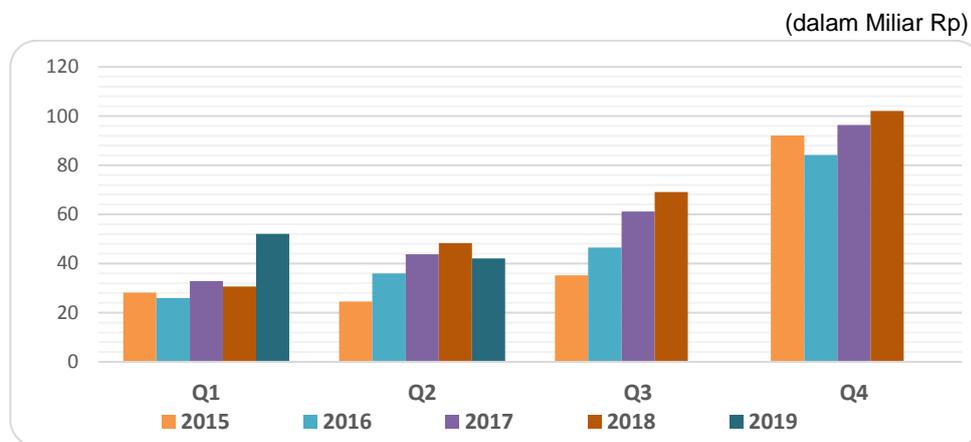
Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 29 Juli 2019) (data diolah);

Realisasi PPN triwulan II 2019 sebesar Rp433,6 miliar. Jumlah tersebut menurun sebesar 3,09% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 (Rp447,4 miliar). PPN Dalam Negeri masih menjadi dominan membentuk penerimaan

PPN sebesar Rp428,93 miliar atau 98,92% dari total Penerimaan PPN. Sedangkan PPN Impor, PPN Lainnya dan PPnBM Dalam Negeri secara total hanya sebesar Rp4,66 miliar.

c) Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional 2015-2019 di Provinsi Jambi

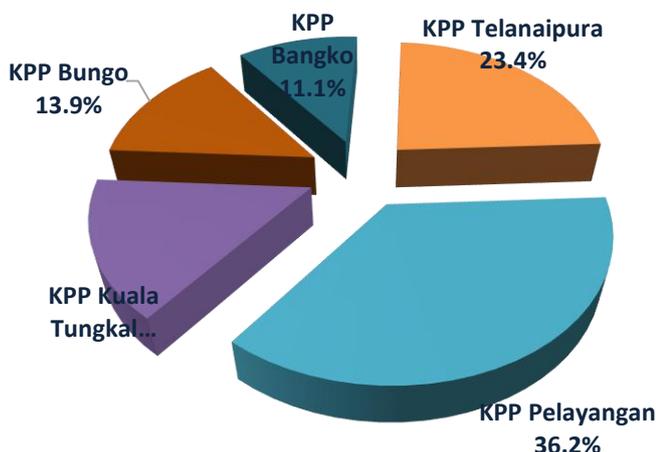


Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 29 Juli 2019) (data diolah);

Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional triwulan II 2019 mencapai Rp42,06 miliar. Turun dibanding periode yang sama tahun 2018 (Rp48,25 miliar). Rinciannya, Pendapatan Pajak Lainnya Rp16,6 miliar. Terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp5,41 miliar, Cukai Rp61,2 juta dan Pajak Lainnya Rp11,15 miliar, sedangkan realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp25,42 miliar terdiri dari Bea Masuk (Rp2,67 miliar) dan Bea Keluar (Rp22,53 miliar).

Penerimaan Pajak Menurut KPP Lingkup Provinsi Jambi

Grafik 2.4 Komposisi Penerimaan Pajak Menurut KPP Tahun 2019 (s.d. Triwulan II)



Sumber: KPP se-Provinsi Jambi Tahun 2019 (data diolah)

Berdasarkan data dari KPP di Provinsi Jambi (dari target Rp5,59 triliun), hingga 2019-Q2 telah tercapai sebesar Rp1,79 triliun atau 32,14% dari target. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (31,96%). Begitupula secara nominal masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Rp1,74 triliun), komposisinya yaitu: Secara nominal dan capaian target realisasi, KPP Jambi Pelayangan memiliki realisasi terbesar Rp649,98 miliar (40,09% dari target Rp1,62 triliun).

“Proyeksi realisasi pendapatan perpajakan s.d. triwulan IV-2019 (seluruh KPP) masih sangat optimis dengan capaian 85%-90% dari total target penerimaan perpajakan”.

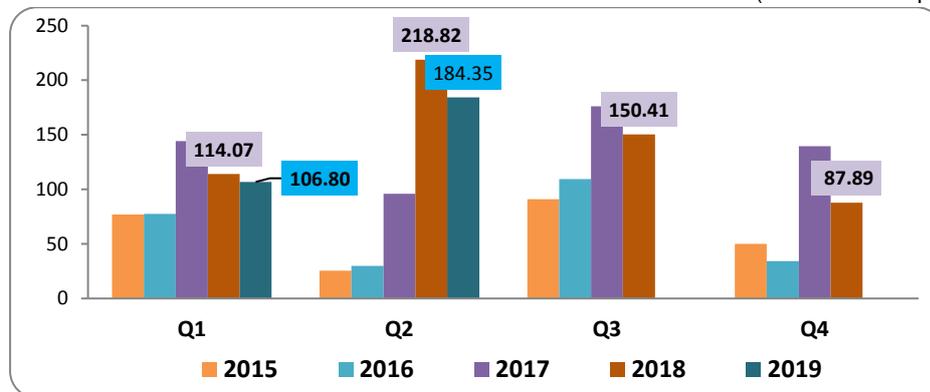
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan PNBP

Grafik 2.5 Realisasi PNBP 2015-2019 di Provinsi Jambi

(dalam Miliar Rp)

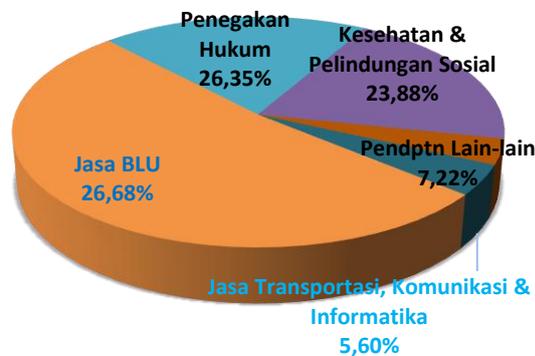


Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 29 Juli 2019) (data diolah);

Realisasi PNBP triwulan II 2019 sebesar Rp184,34 miliar atau berkontraksi hingga 15,75% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (Rp218,82 miliar). Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) penyumbang terbesar dengan Rp112,58 miliar, diikuti Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial & Keagamaan sebesar Rp28,84 miliar, dan Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp26,99 miliar

b) Komposisi PNBP di Provinsi Jambi

Grafik 2.6 Komposisi PNBP di Provinsi Jambi Tahun 2019 (s.d. triwulan II)



Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 29 Juli 2019) (data diolah);

Secara akumulatif, komposisi PNBP s.d. triwulan II 2019 didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) sebesar Rp140,73 miliar atau 48,34% dari total PNBP. Berikutnya, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp55,13 miliar (18,94%), Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan Rp54,34 miliar (18,67%), Pendapatan Lain-lain Rp9,62 miliar (3,31%), dan Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi & Informatika sebesar Rp11,47 miliar (3,94%).

“Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) Badan Layanan Umum di wilayah Provinsi Jambi, yaitu: 2 BLU Bidang Kesehatan (RS. Bhayangkara Jambi dan RS.DKT Bratanata) dan 2 BLU Bidang Pendidikan (UIN Sultan Thaha Saefudin dan Universitas Jambi)”

3. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, baik hibah langsung maupun hibah tidak langsung. Berdasarkan data SPAN, untuk Provinsi Jambi s.d. triwulan II 2019 **tidak terdapat** penerimaan yang berbentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan II
Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2019**

(dalam Juta Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I (Rp)	(%) Realisasi atas Pagu
Hibah	-	-	-
Hibah Langsung	-	-	-
Total Hibah	-	-	-

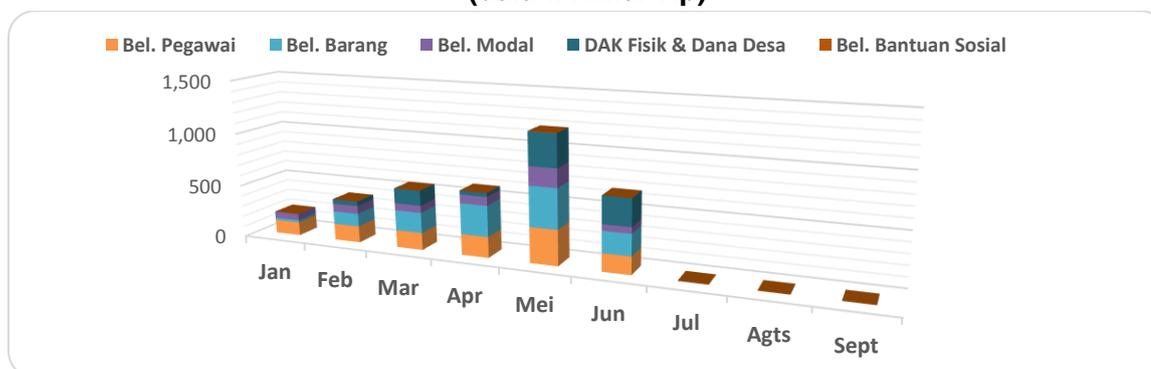
Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 29 Juli 2019) (data diolah);

B. Belanja Negara

Belanja negara merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal, berupa tambahan belanja pemerintah (*increased spending*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk membantu sektor riil. Belanja negara (APBN) di Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat

**Grafik 2.7 Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, DAK Fisik & Dana Desa, serta Bantuan Sosial di Provinsi Jambi TA 2019
(dalam miliar Rp)**



Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>; (diakses 2 Mei 2019) (data diolah);

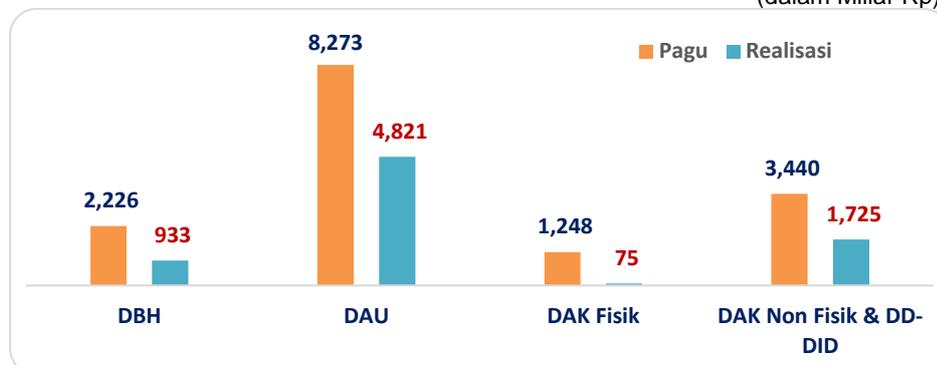
Realisasi belanja (APBN) di Provinsi Jambi s.d. Triwulan II-2019 telah mencapai Rp3,63 triliun (tidak termasuk DAU, DBH, dan DAK Non Fisik) atau sebesar 38,26% dari total pagu alokasi. Rinciannya, belanja pegawai Rp1,14 triliun, belanja barang Rp1,2 triliun, belanja modal Rp516,5 miliar, belanja sosial Rp3,2 miliar, DAK Fisik Rp74,6 miliar dan Dana Desa sebesar Rp703,35 miliar. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) oleh Kanwil DJPB Provinsi Jambi, kinerja penyerapan belanja s.d. Triwulan II-2019 mencapai 38,25% masih dibawah target nasional yakni 40% disebabkan masih banyak satuan kerja (alokasi belanja modal cukup besar) yang belum mengeksekusi belanja modal (baru sekitar 27,98% dari alokasi belanja modal) dan satker DK/TP belum mendapatkan petunjuk teknis dari K/L pusat sehingga belum dapat mengajukan pencairan belanja. Meskipun begitu, berdasarkan indeks kualitas

penyerapan anggaran (IKPA) mayoritas satuan kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jambi di triwulan II 2019 memiliki nilai yang lebih baik (nilai 93,63) dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (nilai 80,74).

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Grafik 2.8 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2019 (s.d. Juni 2019)

(dalam Miliar Rp)



Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/>, SIMTRADA (diakses 29 Juli 2019) (diolah)

Realisasi penyaluran Dana Transfer ke Kas Daerah hingga Triwulan II-2019 sebesar Rp7,55 triliun atau 49,74% dari alokasi pagu. Realisasi DAK Fisik tahap I sudah mulai disalurkan oleh KPPN hingga bulan Juni 2019 sebesar Rp74,6 miliar atau baru sebesar 6,0% dari total pagu DAK Fisik dikarenakan sebagian besar Pemda belum melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I 2019. Persyaratan tersebut yaitu daftar kontrak kegiatan dan laporan realisasi penyerapan dana dan telah melakukan input data capaian output kegiatan DAK Fisik Tahun 2018 yang telah direviu APIP. KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa hanya dapat melaksanakan penyaluran DAK Fisik dari Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan pada **capaian penyerapan belanja** dan **capaian output** per bidang yang telah direviu APIP (yang dikelola oleh SKPD Pemda) untuk DAK Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga realisasinya akan berdasarkan prestasi masing-masing Pemda dalam melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pengelolaan BLU

Pada 2019, BLU Pusat yang terdapat di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Jambi adalah UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi. Kemudian ditambah Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang telah ditetapkan menjadi BLU di bidang pelayanan kesehatan (pertengahan triwulan II-2017) dan Universitas Jambi (akhir tahun 2017) dan terakhir adalah Rumah Sakit Dr.Bratanata (awal tahun 2019).

Untuk RS Bhayangkara, saat ini sudah menjadi BLU Kesehatan secara penuh. Tahapan masa transisi telah dilalui RS Bhayangkara dengan memenuhi seluruh persyaratan sesuai standar pelayanan minimal BLU di bidang kesehatan. Keberadaan 4 BLU tersebut telah memberikan dampak terjadinya peningkatan penerimaan negara bukan pajak sampai dengan triwulan II-2019 sebesar 49,6% dari total PNBPN.

Manajemen Investasi Pusat

Perkembangan Penyaluran KUR di Provinsi Jambi

Di Provinsi Jambi, penyaluran KUR (Mikro, Ritel, dan TKI) tahun 2019 dilaksanakan oleh 12 (sepuluh) lembaga keuangan perbankan, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BCA, Maybank, BPD Jawa

Tengah, BPD Jambi, BPD Sumatera Barat, Bank Tabungan Negara, BRI Syariah, Bank Bukopin, dan BRI Agro dengan total nilai *outstanding* Rp1,06 triliun. Berdasarkan data SIKP, nilai akad realisasi KUR 2019 s.d triwulan II di Provinsi Jambi mencapai Rp1,33 triliun dengan jumlah debitur mencapai 30.354 debitur.

Tabel 2.4 Realisasi Penyaluran KUR Menurut Sektor Usaha 2019

No	Sektor Usaha	Realisasi KUR 2019		
		Akad (djm jutaan)	Outstanding (djm jutaan)	Debitur
1	Pertanian dan Kehutanan	773,082	637,834	16,666
2	Perikanan	12,918	9,517	240
3	Industri Pengolahan	26,595	20,983	749
4	Konstruksi	705	234	5
5	Perdagangan Besar & Eceran	439,994	340,150	10,719
6	Penyediaan Akomodasi & Makanan	16,612	12,491	233
7	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	10,188	8,009	205
8	Real Estate, Persewaan & Jasa	3,858	3,124	54
9	Jasa Pendidikan	365	315	7
10	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,262	1,592	36
11	Jasa Kemasyarakatan, Sospud, & Hiburan	43,757	35,106	1,440
Total		1,330,335	1,069,354	30,354

Sumber: <https://sikap.kemenkeu.go.id> (akses tanggal 31 Juli 2019)

Sektor usaha yang paling besar menerima program KUR didominasi oleh sektor Pertanian dan Kehutanan dengan nilai *outstanding* Rp637,83 miliar. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar & Eceran dengan nilai *outstanding* Rp340,15 miliar dan sisanya (Rp91,37 miliar) terbagi ke 9 sektor lainnya. Penyaluran KUR Mikro didominasi oleh BRI dengan nilai *outstanding* Rp357,52 miliar, sedangkan Bank Mandiri dominan menyalurkan KUR Ritel (Rp452,32 miliar).

Belum optimalnya realisasi penyaluran KUR di Provinsi Jambi salah satu penyebab utamanya adalah masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi yang mendorong akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing dalam iklim usaha yang kompetitif.

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan dan belanja APBN s.d. triwulan IV-2019 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp5,21 triliun (88,36% dari target) dan Rp8,84 triliun (92,97%). Besaran proyeksi pendapatan memperhatikan masih fluktuatifnya harga komoditas unggulan (sawit dan karet) sehingga akan mempengaruhi pendapatan perpajakan (PPH Ps.21 dan Ps.25/29 Badan). Untuk belanja, diharapkan capaiannya bisa melebihi proyeksi dengan mempertimbangkan petunjuk teknis revisi DIPA 2019 diharapkan belanja dapat diserap sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.5 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2019

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	5,900.70	1,968.10	33.35%	5,213.86	88.36%
Belanja Negara	9,513.77	3,639.90	38.26%	8,844.95	92.97%
Surplus/Defisit	(3,613.07)	(1,672)	-	(3,631.09)	-

Ket: tidak termasuk transfer ke daerah (DAU, DBH, dan DAK Non Fisik)

*) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Informasi berikut merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Provinsi Jambi;

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi
s.d. Triwulan II TA 2019 dan 2018**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	17.317,4	8.216,6	19.121,4	9.034,9
PAD	2.689,0	1.290,2	2.843,5	1.388,0
Pajak Daerah	1.700,8	885,9	1.787,0	888,1
Retribusi Daerah	121,2	41,7	126,6	46,6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	128,6	114,7	129,0	119,7
Lain-Lain PAD yang Sah	738,5	247,9	800,9	333,6
Pendapatan Transfer	14.466,4	6.924,9	16.030,4	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	12.533,0	6.140,6	13.781,8	6.609,4
Dana Bagi Hasil Pajak	1.006,9	273,2	630,0	268,8
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	223,5	269,5	1.159,5	625,3
Dana Alokasi Umum	8.289,4	4.549,0	8.712,6	4.689,5
Dana Alokasi Khusus	3.013,2	1.048,8	3.279,6	1.025,6
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.303,9	730,8	1.436,4	753,2
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	1.303,9	730,8	1.436,4	753,2
Transfer Pemerintah Provinsi	524,8	53,5	541,7	220,6
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	524,8	53,5	541,7	220,6
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	104,7	-	132,4	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	104,7	-	132,4	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	161,9	1,5	387,6	53,8
Pendapatan Hibah	160,9	1,5	387,6	42,8
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	1,0	0,0	1,0	11,0
JUMLAH PENDAPATAN	17.317,4	8.216,6	19.124,4	9.034,9

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
BELANJA	15.726,7	4.956,3	17.283,2	5.661,7
Belanja Pegawai	7.263,6	2.829,9	7.861,5	3.379,9
Belanja Barang	3.675,3	1.068,2	4.105,7	1.344,1
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	41,3	6,2	15,3	118,9
Belanja Hibah	690,8	404,0	659,1	70,5
Belanja Bantuan Sosial	42,7	26,6	54,0	28,4
Belanja Bantuan Keuangan	129,1	-	164,0	109,4
Belanja Modal	3.850,3	618,6	4.341,7	595,6
Belanja Tidak Terduga	33,7	2,7	81,7	14,7
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.444,9	897,9	2.718,1	1.094,0
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	593,3	70,0	632,1	297,5
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	593,3	69,8	632,1	296,7
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	0,3	-	0,8
Transfer Bantuan Keuangan	1.851,6	827,9	2.086,0	796,5
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2,7	-	1,9	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.836,4	826,9	1.765,7	795,5
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	12,5	0,9	318,4	1,0
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	18.171,5	5.854,2	20.001,3	6.624,5
SURPLUS/DEFISIT	(854,1)	2.362,4	(876,9)	2.410,4

Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD se-Provinsi Jambi 2019 (data diolah); (Unaudited)

Realisasi APBD agregat lingkup Provinsi Jambi triwulan II 2019 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp9.034,9 miliar atau 47,24% dari total pagu pendapatan daerah. Jumlah realisasi tersebut lebih tinggi 25,31% dibandingkan tahun sebelumnya (Rp8.216,6 miliar). Komposisinya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1.388,1 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp7.593,0 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp53,8 miliar. Berikutnya, realisasi APBD untuk belanja dan transfer daerah baru mencapai Rp6.624,5 miliar atau 33,12% dari total pagu belanja dan transfer daerah. Meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,9%. Realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp1.344,1 miliar (lebih tinggi dibanding realisasi tahun sebelumnya Rp 1.068,2 miliar) dan Rp595,6 miliar (lebih rendah dibanding tahun sebelumnya Rp618,6 miliar). Sedangkan realisasi transfer pemerintah daerah sebesar Rp1.094,0 miliar, jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya (Rp897,9 miliar).

Total belanja realisasi belanja agregat (s.d triwulan II 2019) masih rendah sebesar 28,56% dari pagu. Rendahnya kinerja realisasi belanja daerah juga terlihat dari selisih total pendapatan daerah dengan total belanja dan transfer yang mencapai surplus Rp2.410,4 miliar. Peran *government spending* (pengeluaran konsumsi pemerintah) sebagai stimulus ekonomi Jambi menjadi tidak optimal mengingat laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih ditopang oleh sektor primer (komoditas pertanian dan perkebunan) yang sangat rentan terhadap permintaan dan gejolak harga komoditas global.

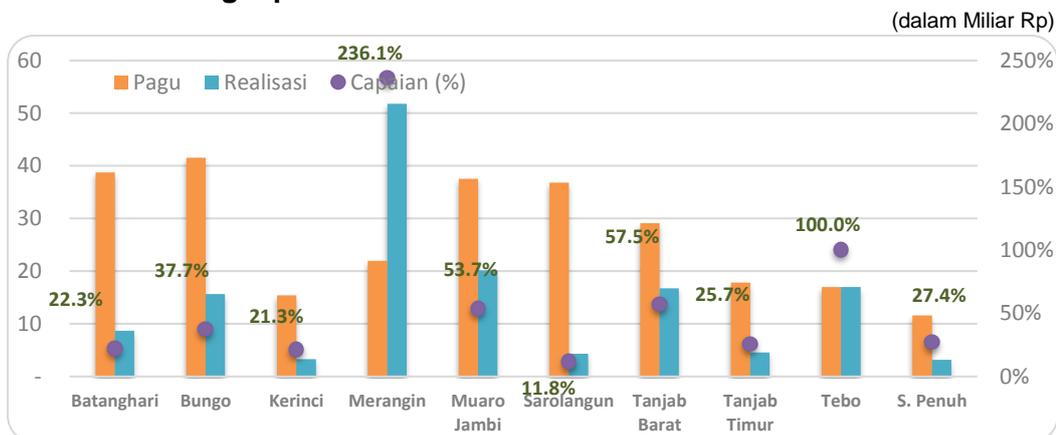
A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD (agregat) sebesar Rp1.388,0 miliar terdiri dari Pajak Daerah Rp888,1 miliar, Retribusi Daerah Rp46,6 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp119,7 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp333,6 miliar. Capaian realisasi PAD agregat mencapai 48,82% dari total target PAD.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019

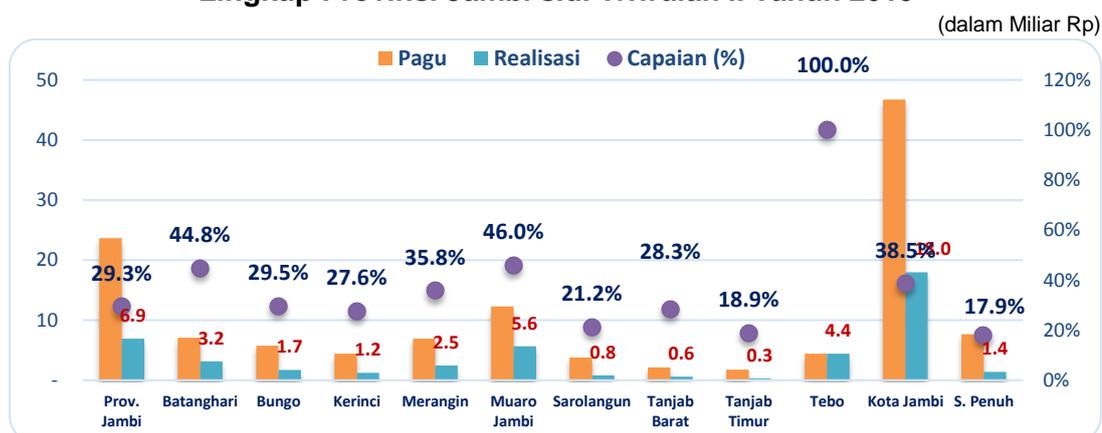


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2019 (diolah)

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (agregat) s.d. triwulan II 2019 (Rp790,33 miliar) tercapai 44,01% dari target, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp885,8 miliar. Berikutnya, realisasi dan capaian penerimaan pajak daerah Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi masing-masing sebesar Rp628,0 miliar (48,4%) dan Rp17,0 miliar (7,6%).

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019

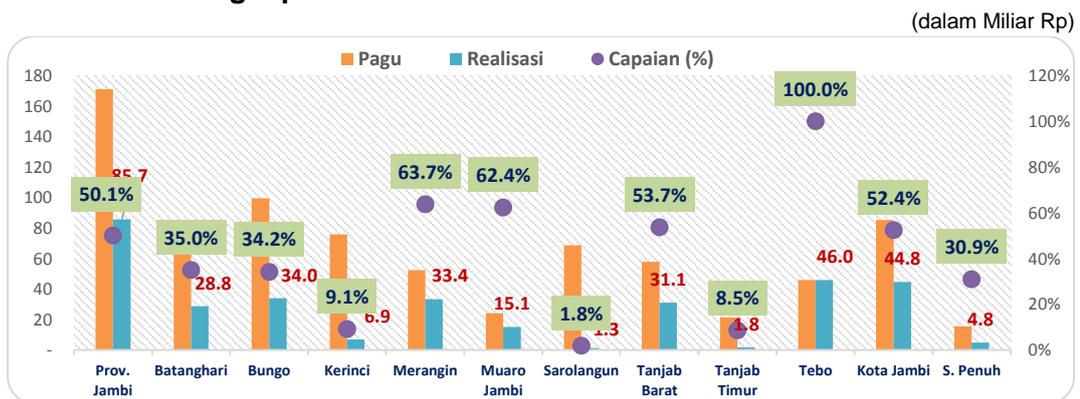


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2019 (diolah)

Untuk Penerimaan Retribusi (seluruh Pemda) s.d. triwulan II 2019 (Rp46,6 miliar) tercapai sebesar 36,87% dari target. Dari sisi capaian, angka tersebut lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu (Rp41,7 miliar). Target penerimaan dari retribusi terbesar adalah Kota Jambi (Rp46,73 miliar) yang menjadi pusat perdagangan dan bisnis di Provinsi Jambi, realisasi hingga triwulan II sudah mencapai Rp17,98 miliar.

c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2019 (diolah)

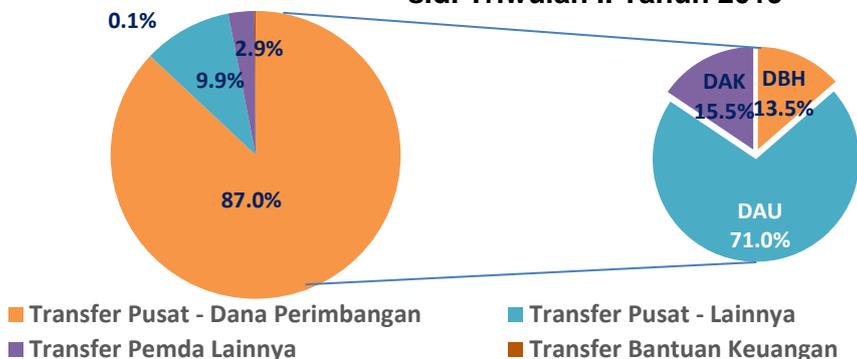
Berikutnya, Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah (agregat) s.d. triwulan II 2019 (Rp333,61 miliar) realisasinya mencapai 41,65% dari total target. Namun perlu kita ketahui bahwa sumber utama penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan BLUD dan pendapatan bunga deposito. Dan secara proporsi, komposisi pendapatan bunga deposito kurang lebih 30%-40% dari total penerimaan, dan kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah. Adanya sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan bunga deposito menunjukkan masih terdapat *idle money* yang dimiliki Pemda dengan nilai yang cukup signifikan (secara agregat).

Masih munculnya Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari imbal jasa bunga deposito/simpanan perbankan mengindikasikan idle money yang dimiliki Pemda dan disimpan di perbankan nilainya signifikan

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan data LRA seluruh Pemda (provinsi/kabupaten/kota) s.d. triwulan II 2019, realisasi pendapatan transfer agregat mencapai Rp7.593,0 miliar. Terdiri dari transfer dana pemerintah pusat (Transfer dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya) masing-masing sebesar Rp6.609,5 miliar dan Rp753,2 miliar, transfer pemerintah provinsi (dana bagi hasil pajak) sebesar Rp220,6 miliar dan transfer bantuan keuangan (bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota lainnya) Rp 9,7 miliar

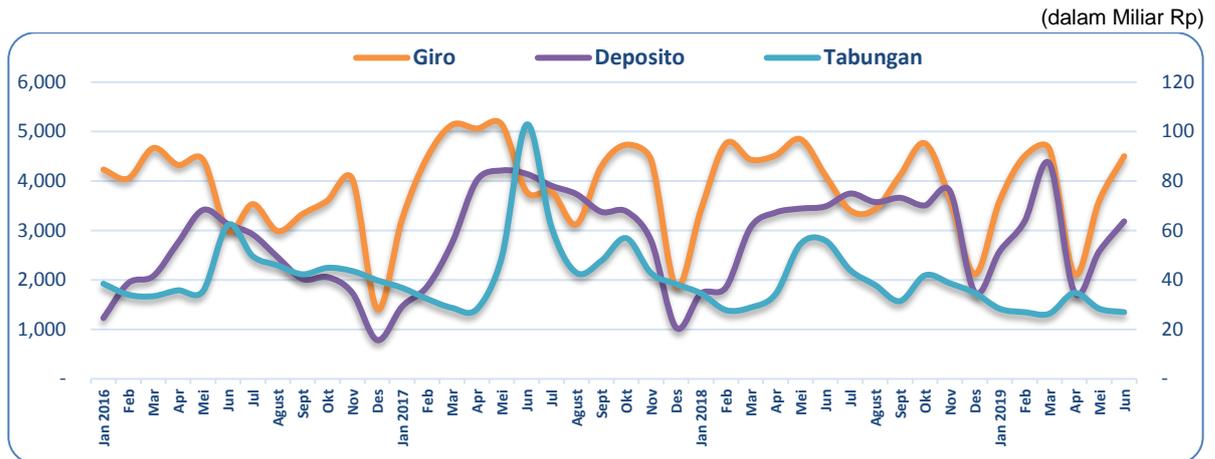
Grafik 3.4 Komposisi Pendapatan Transfer (Agregat) s.d. Triwulan II Tahun 2019



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2019 (data diolah)

Tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Penyebabnya pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan utama bagi 12 pemda lingkup Provinsi Jambi.

Grafik 3.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga 12 Pemda di Provinsi Jambi (2016-2019)



Sumber: Bank Indonesia 2019 (data diolah);

Berikutnya menurut data Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Indonesia, posisi per Juni 2019 menunjukkan Giro, Deposito, dan Tabungan pemda mencapai **Rp4,50** triliun, **Rp3,18** triliun, dan Rp26,97 miliar. Besaran saldo deposito pemda pada triwulan I 2019 memiliki tren yang sama dengan periode tahun sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan pemda untuk menempatkan *idle money* dalam bentuk deposito malah bersifat kontraproduktif terhadap kebijakan belanja pemerintah (*government spending*) yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi dan mampu memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi, menjadi tidak efektif dan kurang optimal.

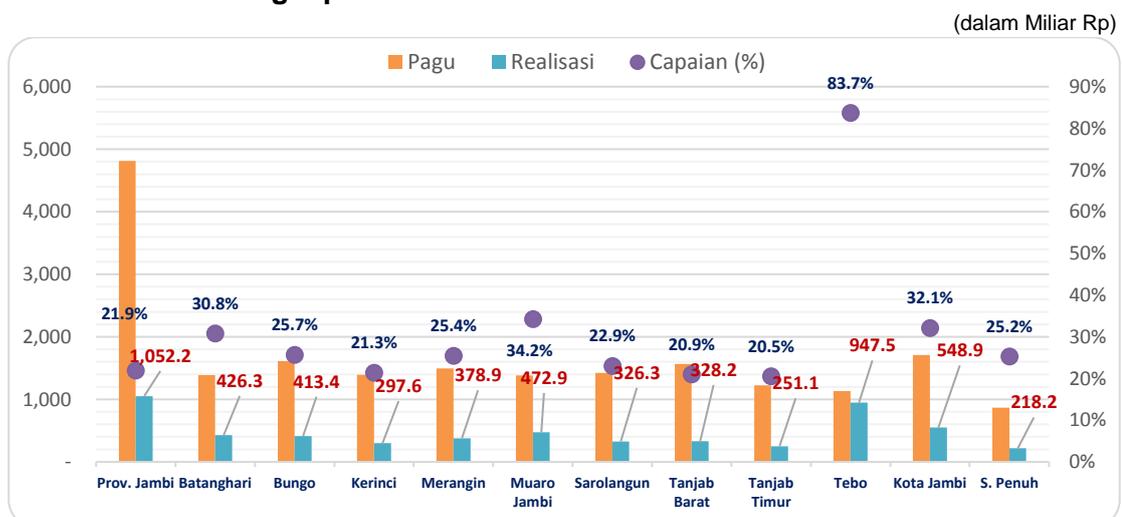
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya, termasuk hibah langsung yang diterima oleh pemerintah daerah. Nilai realisasi dan capaian secara agregat s.d. triwulan II 2019 sebesar Rp53,8 miliar, tidak terlalu signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

B. Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja per Kabupaten/Kota

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019

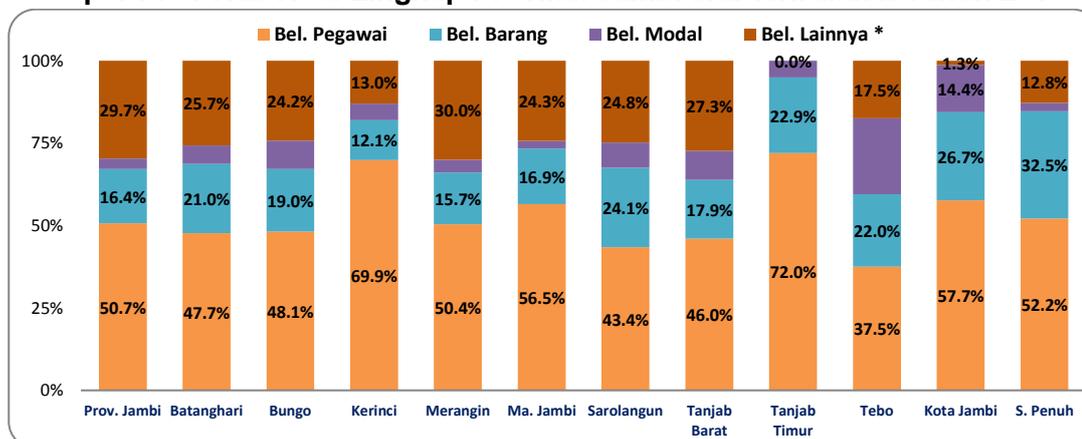


Sumber: DPKAD 2019 (diolah)

Secara agregat, realisasi belanja daerah hingga akhir triwulan II 2019 mencapai Rp5.661,7 miliar (29,23% dari total pagu). Capaian ini secara nominal sedikit menurun dibandingkan realisasi belanja periode yang sama tahun 2018, terserap Rp5,85 miliar. Masih rendahnya serapan realisasi belanja daerah mengakibatkan terjadinya **surplus** hingga mencapai **Rp2,18 triliun**. Dengan begitu, jika dirata-rata (dibagi 12 pemda) terdapat **idle money** dari transaksi berjalan sekitar Rp180,78 miliar.

2. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja per Kabupaten/Kota

Grafik 3.5 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja per Prov/Kab/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD 2019 (data diolah)

Ket: *) Bel. Subsidi, Hibah, Bansos, Tak Terduga, dan Bel. Transfer ke Desa

Menurut jenis belanja, realisasi APBD (agregat) masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp3.379,9 miliar (50,0% dari total realisasi belanja). Diikuti Belanja Barang sebesar Rp1.344,1 miliar (19,9%), Belanja Modal sebesar Rp595,5 miliar (8,8%), dan Belanja Lainnya sebesar Rp1.436,1 miliar (21,3%).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019

Perkiraan pendapatan dan belanja daerah (agregat) s.d. akhir tahun 2019 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp18,8 triliun (98,43% dari target) dan Rp17,20 triliun (86,00%). Proyeksi tersebut merupakan target yang sangat optimis mengingat perlu adanya perbaikan kinerja belanja daerah pada triwulan ke II sampai dengan triwulan IV tahun 2019 berupa percepatan penyelesaian sejumlah proyek di triwulan IV. Selain itu, adanya peran aktif Kanwil DJPB dan KPPN dalam mendukung pelaksanaan monitoring evaluasi transfer ke daerah dan dana desa terhadap kinerja penyerapan belanja dan capaian output, serta ketepatan waktu pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing Pemda secara intensif dan berkelanjutan sehingga memacu Pemda untuk lebih disiplin melaksanakan eksekusi belanja daerah.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jambi Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	19.124,42	9.034,90	47,24%	18.823,53	98,43%
Belanja Daerah	20.001,31	6.624,50	33,12%	17.200,46	86,00%
Surplus/Defisit	-876,89	2.410,40	-	1.623,07	-

Ket: *) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019 dan 2018

(dalam Miliar Rp)

Uraian	2019				2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	1.984,12	8.131,05	3.252,45	-63,1%	8.822,20
Pendapatan Perpajakan	1.692,97	841,71	2.534,68	-3,2%	2.618,19
Pendapatan Bukan Pajak	291,15	7.289,34	717,77	-88,4%	6.204,01
Hibah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transfer	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Belanja Negara	10.415,42	5.708,10	8.570,04	3,6%	8.272,36
Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	2.861,94	4.876,55	7.738,48	4,0%	7.440,11
Transfer	7.553,49	831,55	831,55	-0,1%	832,25
Surplus/(Defisit)	(8.431,30)	2.422,95	(5.317,59)	-1067,1%	549,84
Pembiayaan	-	533,05	533,05	-6,6%	570,86
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	577,72	577,72	-8,1%	628,93
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	44,67	44,67	-23,1%	58,07
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(8.431,30)	2.956,00	(4.784,53)	-526,9%	1.120,69

Sumber : GFS Triwulan II 2019 Kanwil DJPb Prov Jambi (data diolah)

Catatan:

- *) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

Dapat terlihat pada tabel di atas, realisasi penerimaan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya salah satu penyebabnya terlihat pada realisasi belanja daerah yang masih kecil sehingga berdampak pada pergerakan ekonomi di Provinsi Jambi belum optimal yang pada akhirnya potensi penerimaan belum tercapai maksimal.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

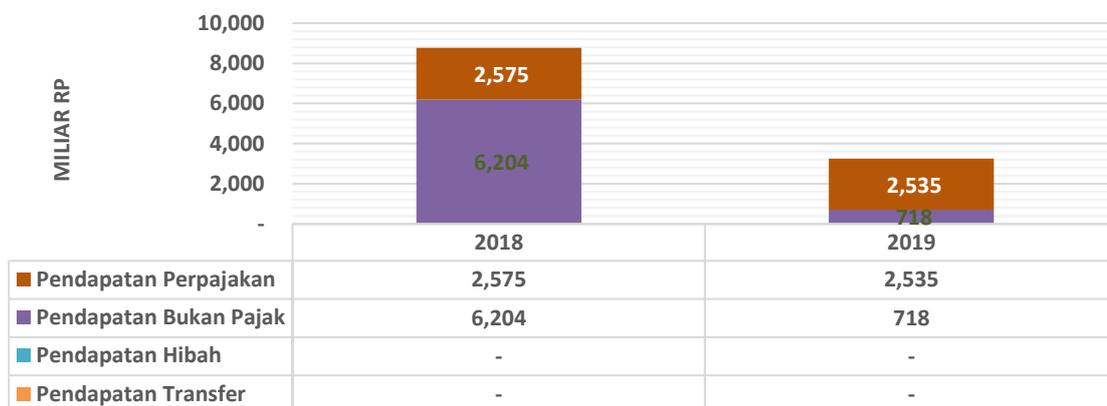
Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian dan PNPB konsolidasian terhadap total pendapatan konsolidasian. Perbandingan komposisi pendapatan, yaitu: antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pendapatan

perpajakan dan PNBPN, dan lain-lain. Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN, hibah dan transfer dana bantuan ke desa.

Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi s.d. Triwulan II TA 2019 dan 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2019 (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian s.d. triwulan II 2019 sebesar Rp1,03 triliun. Berdasarkan komposisinya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, proporsi pendapatan bukan pajak menurun drastis.

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2019



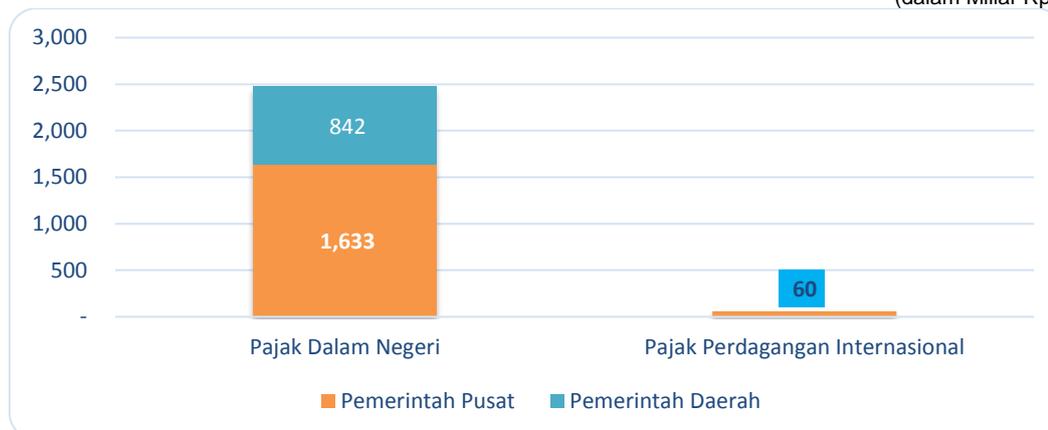
Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2019 (diolah);

Berikutnya, jika pendapatan konsolidasian ditelaah lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka terlihat jelas tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer. Total pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp1.984 miliar, sedangkan dana transfer ke daerah mencapai Rp7.553 miliar sehingga terjadi defisit anggaran. Meskipun demikian, kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran masing-masing daerah sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan II 2019

(dalam Miliar Rp)



Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2019 (diolah);

Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian s.d. triwulan II sebesar Rp1.984 miliar. Proporsi pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp1.633 miliar) dan pemerintah daerah (Rp842 miliar) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian masing-masing mencapai 64,4% dan 33,2%, sedangkan sisanya disumbang pajak perdagangan internasional (Rp60 miliar). Jika realisasi pajak tersebut dijadikan acuan *tax ratio* di Provinsi Jambi, maka nilai *tax ratio*-nya hanya sebesar **0,47%**.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Dengan tersedianya data realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah, maka pendapatan di suatu daerah dapat diperluas tidak hanya pada PAD yang diterima Pemerintah Daerah namun mencakup seluruh penerimaan pemerintah pusat dan daerah di wilayah tersebut yang terdiri:

- Pendapatan pajak daerah,
- Retribusi daerah,
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- Lain-lain PAD yang sah.
- Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Pendapatan BLU Pemerintah Pusat

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019

(dalam miliar)

Uraian	2018		2019	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	2.618,19	-	3.252,45	24,23%
PNBP	6.204,01	-	2.534,68	-59,14%
Total	8.822,20	-	5.787,13	-34,40%
PDRB/Pert. Ekonomi	51.928,20	-	54.324	48,3%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb; BPS 2019 (diolah)

Pada triwulan II 2019, output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) mencapai Rp54,32 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,82% (yoy). Sedangkan pada periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat

terrealisasi sebesar Rp5,787 triliun. Berikutnya, masih rendahnya *tax ratio* dan besarnya selisih (*gap*) nilai pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut, menunjukkan bahwa sebenarnya masih terdapat potensi penerimaan dari aktivitas perekonomian yang belum dioptimalkan pada penerimaan pemerintah daerah.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

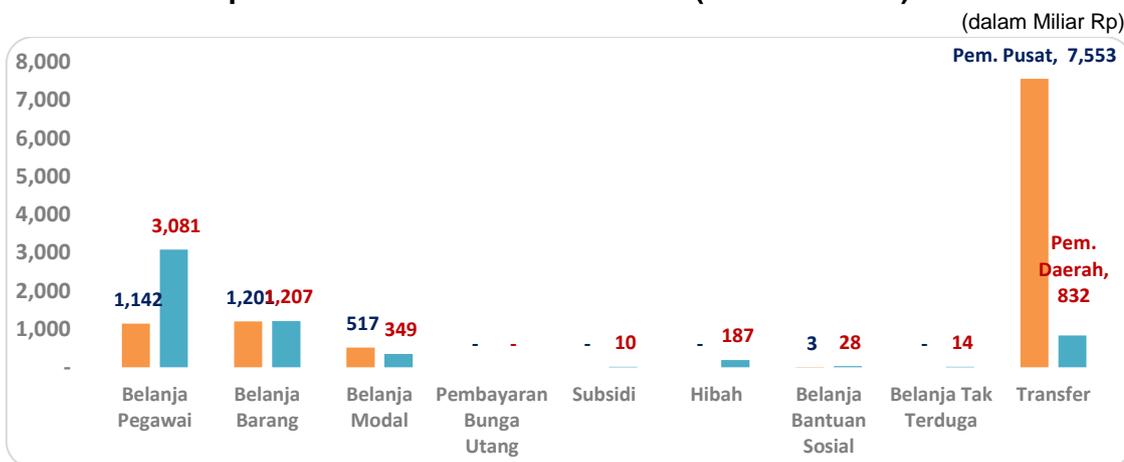
Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas:

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi dan komposisi realisasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), atau perbandingan antara realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja konsolidasian. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi Tahun 2019 (s.d Triwulan II)



Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2019 (diolah);

Berdasarkan jenis belanja, porsi belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing 26,2% dan 14,9% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Sedangkan porsi belanja modal hanya sebesar 5,4% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Masih kecilnya porsi belanja modal dibanding belanja barang, maka belanja/pengeluaran yang lain harus difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung (efek multiplier) terhadap perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi lebih berkualitas. Juga terlihat sangat jelas terdapatnya belanja transfer yang tinggi pada belanja pemerintah pusat.

2. Analisis Perubahan

**Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasi Provinsi Jambi
Triwulan II Tahun 2019 dan 2018**

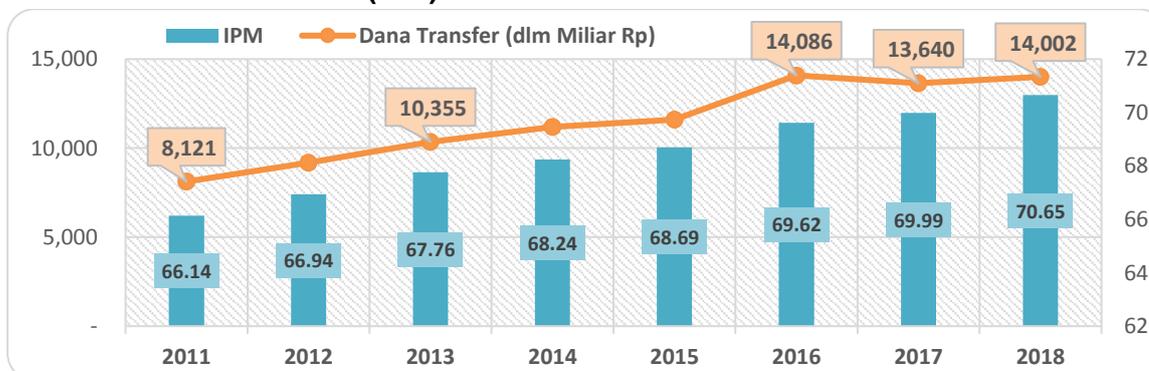


Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2019 (diolah)

Secara umum, komposisi belanja konsolidasi s.d. triwulan II 2019 tidak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Terbesar masih belanja pegawai 44,9% dari total belanja konsolidasi. Diikuti belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 25,6% dan 9,2%. Dibandingkan tahun sebelumnya, perbedaan cukup signifikan terdapat pada belanja subsidi yang mengalami kenaikan (pada tahun 2018 komposisinya mencapai 4,9%).

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Grafik 4.6 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2011-2018



Sumber : BPS, Simtrada 2019 (data diolah)

Kebijakan fiskal (dana transfer) pemerintah pusat lingkup Provinsi Jambi sejalan dengan kebijakan *money follow program* untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam IPM. Hal ini ditandai juga dengan besaran pagu DAK Fisik dan Dana Desa yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, perbaikan kualitas SDM tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi regional yang telah direncanakan.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu:

$$E. Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional, **C** = Konsumsi Rumah Tangga, **I** = Investasi,

G = Belanja Pemerintah, **X** = Ekspor, dan **M** = Impor

Analisis kontribusi pemerintah pada PDRB menggunakan data yang diambil dari Laporan Operasional (*Statement of Government Operations*). Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi triwulan I Tahun Pelaporan:

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		
A1	Pendapatan	14.489.134.678.786
a	Pajak	2.534.580.060.498
b	Kontribusi Sosial	-
c	Hibah	712.934.256.382
d	Pendapatan Lainnya	11.241.620.361.906
A2	Beban	9.216.893.883.697
a	Kompensasi Pegawai	4.250.731.012.166
b	Penggunaan Barang dan Jasa	2.249.640.008.142
c	Konsumsi Aset Tetap	-
d	Bunga	-
e	Subsidi	9.826.150.871
f	Hibah	2.530.304.175.498
g	Manfaat Sosial	31.672.109.726
h	Beban Lainnya	144.720.427.293
GOB	Keseimbangan Operasi Bruto/Neto (1-2+23+NOBz)	5.272.240.795.089
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :		
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	865.171.382.175
a	Aset Tetap	856.744.320.095
b	Perubahan Persediaan	-
c	Barang Berharga	-
d	Aset Non Produksi	8.427.062.080
NLB	Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	4.407.069.412.914
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :		(4.407.069.412.914)
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	4.395.897.689.514
a	Dalam Negeri	4.395.897.689.514
b	Luar Negeri	-
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(11.171.723.400)
a	Dalam Negeri	(11.171.723.400)
b	Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Kanwil DJPb 2019 (diolah)

Dalam Laporan Operasional, kita dapat menghitung kontribusi pemerintah terhadap PDRB, terutama dari belanja pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja pemerintah (G) dicerminkan/diproxykan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah yang berasal

dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai investasi pemerintah dicerminkan/diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, dalam Laporan Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto.

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Perhitungan:

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Rp9,23 triliun, PMTB Rp0,87 triliun dan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi Rp53,24 triliun, maka didapatkan;

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah $9,23/53,24 = 17,34\%$
2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah $0,87/53,24 = 1,63\%$

Berdasarkan data diatas, kontribusi belanja pemerintah terhadap output ekonomi Jambi mencapai 17,34%. Namun dari jumlah tersebut, sebagian akan terdistribusi ke dalam konsumsi rumah tangga jika dilihat dari struktur PDRB yang dirilis BPS. Meskipun relatif kecil namun kontribusi belanja pemerintah memiliki peran cukup signifikan terhadap perekonomian Jambi. Belanja pemerintah (belanja pegawai dan belanja barang) cenderung bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, sehingga peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi akan kurang optimal ketika realisasi belanja tidak terserap secara teratur dan hanya menumpuk di akhir tahun. Sama halnya dengan investasi pemerintah yang memiliki kontribusi 1,63% terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Meskipun pada triwulan ini belum memiliki nilai yang tinggi, diharapkan pemerintah ke depannya akan memperhatikan pelaksanaan investasi sehingga dapat mempengaruhi perekonomian pada masa yang akan datang.

Untuk saat ini, realisasi belanja pemerintah (baik pusat dan daerah) perlu disegerakan untuk diakselerasi penyerapannya (khususnya belanja daerah) agar tidak terjadi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran. Realisasi belanja yang terkonsentrasi hanya pada triwulan III dan IV akan berakibat pada minimnya kontribusi belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Ekonomi Jambi sangat bergantung terhadap sektor primer sehingga ketika terjadi *shock* pada harga dan permintaan komoditas unggulan (minyak bumi dan gas, batubara, karet, dan CPO) akan langsung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jambi. Mempertimbangkan harga komoditas (sawit dan karet) yang masih fluktuatif (trennya menurun) hingga akhir tahun 2019, peran *government spending* sangat dibutuhkan sebagai stimulus perekonomian sehingga laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih mampu tumbuh meskipun ada resiko eksternal.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2019

DAK Fisik

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, maka mekanisme penyaluran DAK Fisik di Tahun 2019 pada setiap tahapannya diwajibkan telah melalui proses revidi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah. Total alokasi DAK Fisik Provinsi Jambi di tahun 2019 mencapai Rp 1,24 triliun dengan total realisasi penyaluran hingga Triwulan II-2019 sebesar Rp74,6 miliar,- atau baru sebesar 5,98%.

Tabel 5.1. Komposisi DAK Fisik (Bertahap & Sekaligus) berdasarkan Jenis Dana TA 2019

(dalam jutaan Rp)

No	Pemda	DAK Reguler			DAK Penugasan			DAK Afirmasi		
		APBN	Realisasi	Sisa Dana	APBN	Realisasi	Sisa Dana	APBN	Realisasi	Sisa Dana
1	Prov. Jambi	100,422	-	100,422	80,997	-	80,997	-	-	-
2	Batanghari	65,483	5,098	60,385	11,821	664	11,157	-	-	-
3	Tanjab Barat	71,533	-	71,533	12,833	-	12,833	-	-	-
4	Bungo	44,629	7,310	37,319	56,462	1,641	54,821	10,363	1,160	9,203
5	Sarolangun	107,792	7,103	100,688	13,939	-	13,939	8,917	588	8,330
6	Kerinci	67,202	7,558	59,643	14,941	826	14,115	-	-	-
7	Merangin	121,179	16,794	104,385	17,163	-	17,163	-	-	-
8	Tanjab Timur	88,212	11,246	76,966	14,518	992	13,526	16,157	388	15,770
9	Tebo	63,206	11,722	51,484	11,541	1,561	9,980	-	-	-
10	Muaro Jambi	62,743	-	62,743	14,202	-	14,202	-	-	-
11	Kota Jambi	54,093	-	54,093	56,817	-	56,817	-	-	-
12	Kota S. Penuh	54,900	-	54,900	5,760	-	5,760	-	-	-
Total		901,393	66,832	834,561	310,992	5,684	305,308	35,438	2,135	33,303

Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/> (diakses 01 Agustus 2019) (data diolah)

Dari total alokasi tersebut, terdapat 5 Pemerintah Daerah yakni Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang belum memiliki realisasi DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi) dengan total alokasi masing-masing Rp343,6 miliar, Rp170,6 miliar, dan Rp0,-. Sebaliknya, Kabupaten Merangin menjadi daerah dengan realisasi DAK Fisik tertinggi dengan total realisasi sebesar Rp16,7 miliar. Realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada DAK Fisik Reguler bidang Pendidikan dengan nilai Rp30,68 miliar atau 11% dari alokasinya (Rp278,3 miliar). Berikutnya, DAK Fisik Reguler bidang Jalan (Rp23,01 miliar) dan DAK Fisik bidang Kesehatan & KB (Rp9,1 miliar). Sedangkan DAK Fisik Reguler terdiri dari bidang Air Minum, Perumahan & Permukiman, Sanitasi; DAK Fisik Penugasan terdiri dari bidang Pendidikan SMK dan LHK; DAK Fisik Afirmasi terdiri dari bidang Air Minum dan Sanitasi hingga akhir Juni 2019 belum terdapat realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD.

Tabel 5.2. Total Realisasi DAK Fisik per Bidang TA 2019

No	DAK Fisik per Bidang	APBN	Realisasi Penyaluran	%	Sisa Dana
1	Reguler - Pendidikan	278,358,263,000	30,689,306,750	11%	247,668,956,250
2	Reguler - Kesehatan & KB	187,505,805,000	9,120,857,466	5%	178,384,947,534
3	Reguler - Air Minum	24,345,529,000	-	0%	24,345,529,000
4	Reguler - Perumahan & Pemukiman	8,296,894,000	-	0%	8,296,894,000
5	Reguler - Pertanian	44,443,083,000	2,214,146,500	5%	42,228,936,500
6	Reguler - Pariwisata	19,528,250,000	768,493,000	4%	18,759,757,000
7	Reguler - Industri Kecil & Menengah	7,328,750,000	-	0%	7,328,750,000
8	Reguler - Pasar	-	-	0%	-
9	Reguler - Kelautan & Perikanan	14,570,196,000	1,019,722,000	7%	13,550,474,000
10	Reguler - Sanitasi	16,774,569,000	-	0%	16,774,569,000
11	Reguler - Jalan	300,241,917,000	23,019,803,250	8%	277,222,113,750
12	Penugasan - Pendidikan SMK	61,510,651,000	-	0%	61,510,651,000
13	Penugasan - Kesehatan	111,660,223,000	826,029,000	1%	110,834,194,000
14	Penugasan - Sanitasi	23,448,630,000	664,003,750	3%	22,784,626,250
15	Penugasan - Air Minum	24,933,246,000	867,362,750	3%	24,065,883,250
16	Penugasan - Jalan	-	-	0%	-
17	Penugasan - Pasar	39,092,297,000	755,448,000	2%	38,336,849,000
18	Penugasan - Irigasi	38,170,734,000	2,571,231,000	7%	35,599,503,000
19	Penugasan - Energi Skala Kecil	-	-	0%	-
20	Penugasan - LH & Kehutanan	12,176,437,000	-	0%	12,176,437,000
21	Afirmasi - Kesehatan	-	-	0%	-
22	Afirmasi - Perumahan & Pemukiman	-	-	0%	-
23	Afirmasi - Transportasi	19,239,127,000	1,747,586,250	9%	17,491,540,750
24	Afirmasi - Pendidikan	4,542,282,000	387,663,250	9%	4,154,618,750
25	Afirmasi - Air Minum	2,050,000,000	-	0%	2,050,000,000
26	Afirmasi - Sanitasi	9,606,479,000	-	0%	9,606,479,000
Total		1,247,823,362,000	74,651,652,966	5.98	1,173,171,709,034

Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/> (diakses 01 Agustus 2019) (data diolah)

Dengan semakin meningkatnya alokasi penyaluran DAK Fisik di daerah khususnya di Provinsi Jambi telah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun (IPM 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan besaran indeks berturut-turut 68,24; 68,69; 69,62; 69,99 dan 70,65) dapat terlihat dengan besarnya porsi DAK Fisik bidang jalan, pendidikan dan kesehatan khususnya di wilayah Provinsi Jambi

Namun demikian, dalam penyaluran DAK Fisik tahap I hingga Triwulan II-2019 terkait pemberlakuan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 diperkirakan masih ditemukan beberapa permasalahan yang harus mendapatkan perhatian. **Identifikasi permasalahan penyaluran DAK Fisik tingkat Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :**

1. Kurangnya koordinasi antar SKPD-BPKAD dan Inspektorat Daerah terkait pelaksanaan rewiu dokumen persyaratan DAK Fisik sebagai pemenuhan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyaluran tahap I (khususnya dokumen yang akan direkam dan *upload* dalam OMSPAN);
2. Lambatnya proses tender/lelang di pemda yang berdampak terhadap terlambatnya proses perekaman dan upload data kontrak pada aplikasi OMSPAN sehingga DAK Fisik tahap I belum dapat disalurkan

- 
3. Ketidaktepatan waktu tersedianya aplikasi OMSPAN yang menyebabkan keterlambatan perekaman penyelesaian pekerjaan dan pelaporan capaian output di pemda sehingga DAK Fisik tahap I belum dapat disalurkan;

Rekomendasi

1. Dalam rangka meminimalkan resiko gagal salur untuk tahap I, Kanwil DJPB Provinsi Jambi meminta KPPN untuk berperan aktif dengan meningkatkan koordinasi intensif dan sinergi antara KPPN-Pemda (BPKAD, Inspektorat Daerah dan SKPD) secara berkelanjutan dalam penyaluran DAK Fisik TA 2019, antara lain (1) KPPN membuat surat penegasan penyaluran DAK Fisik tahap I dan (2) membuat media komunikasi via WA group yang beranggotakan Kanwil DJPB, KPPN dan Pemda;
2. Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik TA 2019 tahap I bersama KPPN dan berkoordinasi dengan Pemda lingkup Provinsi Jambi dalam mengurangi resiko gagal salur dan/atau lebih/kurang salur (penyaluran tahap selanjutnya).
3. Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus berkoordinasi dengan Kantor Pusat terkait kesiapan Aplikasi OMSPAN dalam proses penyaluran DAK Fisik tahap I 2019.
4. Meminta KPPN untuk lebih teliti dalam memvalidasi keakuratan jumlah dan kebenaran dokumen sumber penyaluran DAK Fisik, salah satunya dengan membuat kartu pengawasan manual DAK Fisik.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

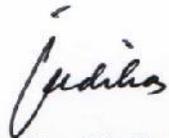
Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45 Jambi 36122
TELEPON : (0741) 668795, 668802, 669528 FAKSIMILE: (0741) 668801
E-mail : kanwil.jambi@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND - 497 /WPB.06/2019

Yth. : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan II (*Quarterly Fiscal Report*)
Tahun 2019 Kanwil DJPB Provinsi Jambi
Tanggal : 9 Agustus 2019

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Kajian Fiskal Regional, dengan ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II (*Quarterly Fiscal Report*) Tahun 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


Judika Sirait